

Skema Pembayaran Pensiun Fully Funded Bukan Ditunda Atau Dibatalkan, Stafsus Menkeu: Masih Kajian

Staff Khusus Menteri Keuangan Sektor Komunikasi [Berita Bola Hari Ini](#) Vital Yustinus Prastowo memperjelas jika pola pembayaran pensiun Aparat Sipil Negara (ASN) dengan pola fully funded bukan diundur atau diurungkan. Tetapi, sampai sekarang ini masih juga dalam tahapan pengkajian.

"Karenanya kan perlu pengkajian, dasar hukumnya, lalu peralihan. Hitung cut off-nya tidak gampang. Di antara yang dahulu memakai pola lama (pay as you go) selanjutnya ganti ke pola baru," tutur Prastowo saat dijumpai Tempo di Hotel Bintang Baru Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Desember 2022.

Selain itu, faksinya masih tetap mempertimbangkan beberapa resiko untuk memulai mengaplikasikan mekanisme ini. Khususnya dari pendistribusian budget. Prastowo berkata, dana yang dipakai perlu dicadangkan terlebih dulu.

Ke-2, Kementerian Keuangan masih memerlukan proses panjang untuk pencatatan karyawan. "Kapan ia pensiun. Ingin diawali darimanakah, itu perlu ditelaah karena banyaknya kan juta-an. Maka, masih perlu proses panjang," sebut Prastowo.

Awalnya, Direktur Jenderal Bujet Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengutarakan argumen fundamental pemerintahan ingin mengganti pola pembayaran uang pensiunan untuk beberapa karyawan negeri sipil (PNS), atau TNI/Polri.

Isa menerangkan, ini karena kewajiban pembayaran pensiunan untuk ASN semakin meningkat tiap tahunnya. Walau sebenarnya, dengan pola pensiun pay as you go yang diaplikasikan sekarang ini pemerintahan tidak mempersiapkan dana khusus untuk penuhi kewajibannya ke beberapa pensiunan itu, tetapi disanggupi saat ASN itu pensiun.

"Karena orang yang pensiun lama-lama semakin bertambah, umur keinginan hidupnya semakin panjang, sendirinya besar faedah tiap bulan semakin itu yang kerap kali membuat worry kita, membuat kuatir kita," kata Isa dalam dialog di kantornya, Senin, 29 Agustus 2022.

Dalam 5 tahun akhir, Isa menjelaskan, besaran kewajiban pemerintahan untuk bayar pensiunan ASN semakin bertambah. Pada 2022 diprediksi Rp 119 triliun, tahun kemarin sejumlah Rp 112,29 triliun, 2020 sekitar 104,97 triliun, 2019 Rp 99,75 triliun, dan 2018 cuma Rp 90,82 triliun.

"Jadi besaran faedah pensiun tiap bulan semakin, itu yang sering membuat kita kuatir. Tahun ini untuk pembayaran pensiun nyaris sampai Rp 120 triliun, lima tahun lalu mungki sekitaran Rp 90 demikian triliun," tutur ia.

Dengan pola fully funded itu, secara struktural dilaksanakan penyesuaian dana, tak lagi seperti pola pay as you go yang dananya ada saat ASN itu masuk periode pensiun. Disamping itu ada penumpukan dana yang dijaga nilainya sebegitu rupa, supaya cukup mengongkosi pembayaran pensiun sampai habis.

Bupati Meranti Muhammad Adil menjelaskan daerah yang ia memimpin ialah wilayah miskin yang semestinya jadi fokus utama pemerintahan pusat.

Dalam dua tahun PLN sukses kurangi utang sejumlah 62,5 triliun rupiah.

Dengan digitalisasi ini, Sri Mulyani menambah, pembayaran pajak makin gampang dan inklusif untuk semua harus pajak.

Informasi terbaru ekonomi dan usaha sampai Selasa sore, 13 Desember 2022 diantaranya Sri Mulyani berbicara pada hari Antikorupsi Sedunia 2022.

Mendagri Tito Karnavian menyapa keras Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebutkan Kemenkeu diisikan oleh iblis.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu minta pemerintahan pusat tidak tutup mata masalah protes yang disodorkan Bupati Meranti Muhammad Adil.

Refly Harun minta seluruh pihak menyikapi protes Bupati Meranti Muhammad Adil secara arif.

Arsul menyebutkan, perlakuan Bupati Meranti itu tidak efisien. Karena untuk mendapat hak itu, bupati punya aliran sah.

Berdasar undang-undang, presiden akan putuskan sekda dipilih berdasar saran dari Pemerintah provinsi DKI

Parlemen Belarus ajukan sebuah RUU yang hendak berlakukan hukuman mati pada PNS dan anggota militer Belarus, yang lakukan pembelotan